

# **KESENJANGAN LAHAN DAN MARJINALISASI PETANI PENGUASAAN LAHAN DAN KEDAULATAN RAKYAT**



# **POLICY BRIEF**

Kesenjangan Lahan dan Marginalisasi Petani  
Penguasaan Lahan dan Kedaulatan Rakyat

---

**Februari 2018**

---

# Kesenjangan Lahan dan Marjinalisasi Petani

---

**Mengabaikan kesenjangan lahan dan konflik agraria adalah strategi ekonomi yang beresiko tinggi.**

Kesenjangan lahan adalah salah satu bentuk kesenjangan ekonomi terburuk yang sepanjang sejarah telah membawa pada kekerasan, konflik sosial bahkan perang sipil. Pemerataan tanah dipandang signifikan dan menjadi keharusan oleh masyarakat karena tanah merupakan faktor produksi dan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk. Mengabaikan kesenjangan lahan dan konflik agraria adalah strategi ekonomi yang beresiko tinggi.

Mendorong distribusi lahan yang merata akan memperbaiki kohesi sosial secara mengesankan, yang pada gilirannya akan mengembangkan kebijakan dan institusi yang inklusif sehingga mempromosikan pertumbuhan dalam jangka panjang. Negara-negara dengan distribusi lahan yang lebih merata, seperti Asia Timur dan Amerika Utara, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan kehidupan politik yang lebih demokratis dibandingkan dengan negara-negara dengan kesenjangan lahan yang tinggi, seperti Amerika Latin.

## Ketimpangan Lahan Pertanian

---

**Dari 4,3 juta RT usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar, sekitar 70% nya berada di Jawa.**

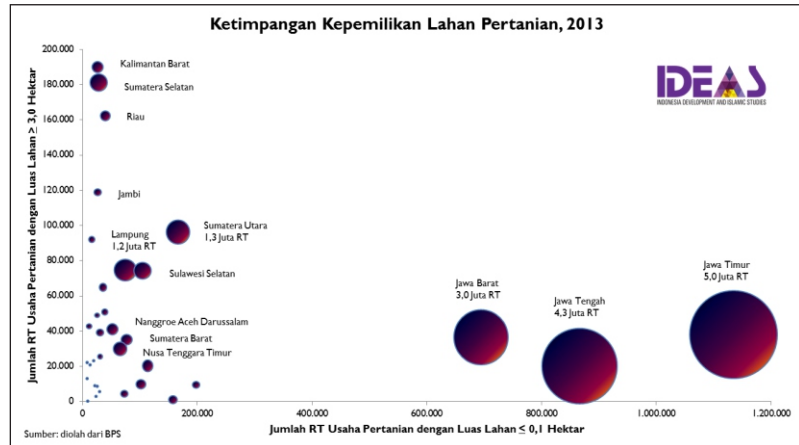
Meski hanya memiliki luas 7% dari lahan nasional, namun Jawa menjadi tumpuan sebagian besar rumah tangga (RT) usaha pertanian. Dari 26,1 juta RT usaha pertanian pada 2013, setengahnya berada di Jawa dan seperempatnya berada di Sumatera. Lebih jauh lagi, lebih dari 55% RT usaha pertanian terkategori petani gurem, yaitu hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Kesenjangan antar RT usaha pertanian paling tinggi ditemui di Jawa, dimana RT usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar paling banyak ditemui. Dari 4,3 juta RT usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar, sekitar 70% nya berada di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang menjadi rumah bagi 12,3 juta RT usaha pertanian, memiliki 2,7 juta RT usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar.

Sementara itu distribusi lahan paling merata ditemui di Sumatera dimana RT usaha pertanian dengan luas lahan lebih

**... pertanian Indonesia secara umum dicirikan oleh pertanian tanaman pangan skala kecil di Jawa dan pertanian perkebunan skala besar di Sumatera.**

dari 3 hektar paling banyak ditemui. Dari 1,6 juta RT usaha pertanian dengan luas lahan lebih dari 3 hektar, sekitar 50% nya berada di Sumatera. Dengan demikian, pertanian Indonesia secara umum dicirikan oleh pertanian tanaman pangan skala kecil di Jawa dan pertanian perkebunan skala besar di Sumatera.



**petani skala kecil justru lebih efisien dalam mengelola tanah, modal dan tenaga kerja dibandingkan dengan petani skala besar.**

Terdapat bukti global yang semakin berlimpah bahwa, berkebalikan dengan anggapan umum, petani skala kecil justru lebih efisien dalam mengelola tanah, modal dan tenaga kerja dibandingkan dengan petani skala besar. Dengan demikian, meski pembangunan pedesaan menjanjikan penurunan kemiskinan, namun hal tersebut bergantung pada partisipasi pemilik lahan kecil dan keluarga miskin dalam produksi, yang hanya dapat difasilitasi oleh redistribusi lahan pertanian. Program *land reform* yang tepat sasaran karenanya memiliki dampak langsung yang signifikan pada penurunan kemiskinan. Petani miskin yang mendapat tanah pertanian yang subur serta didukung tunjangan hidup yang memadai, akan dapat melepaskan dirinya secara permanen dari kemiskinan.

Karakter pembeda utama dari pertanian kecil yang membuatnya efisien bukanlah ukuran tanah yang dikuasainya, namun kebergantungannya pada pekerja keluarga, berbeda dengan pertanian besar yang bergantung pada buruh tani upahan. Pekerja keluarga tidak membutuhkan pengawasan untuk bekerja dengan produktivitas tinggi, dan pemilik tanah memiliki insentif yang kuat untuk menahan keuntungan dan menginvestasikannya kembali di tanah pertanian mereka.

Dengan kata lain, berbeda dengan sektor industri dan jasa, sektor pertanian secara umum justru dicirikan dengan *diseconomies of scale*. Di Indonesia, hal ini secara mudah kita lihat pada RT usaha pertanian dengan sawah hanya setengah hektar mampu memiliki rumah permanen dan menyekolahkan anak hingga universitas. Bahkan RT usaha pertanian dengan

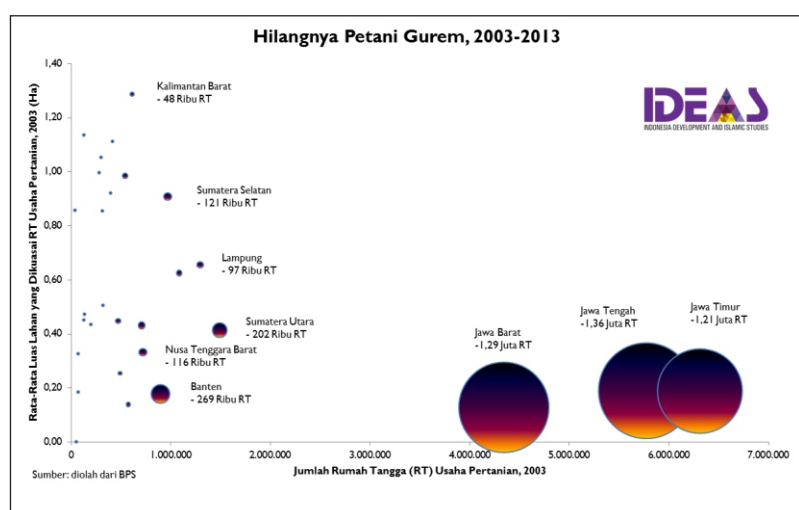
sawah kurang dari 0,1 hektar masih dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan secara intensif mengolah lahannya hingga dua kali panen dalam setahun.

Namun menjadi terlalu “kecil” tentu tidak selalu “indah”. Meski memiliki efisiensi tinggi, namun ukuran lahan yang terlalu kecil membuat petani sering tak mampu menutup kebutuhan hidup dari keuntungan usaha. Menjadi terlalu kecil juga membuat petani kecil menjadi lebih sulit mengakses pasar *input* dan *output*, pembiayaan perbankan, asistensi teknis hingga informasi peluang pasar dan teknologi produksi.

Petani skala kecil juga rentan dengan guncangan eksternal seperti kekeringan yang membawa pada kegagalan panen hingga musibah yang menimpa anggota keluarga. Dengan ketidaksempurnaan pasar kredit dan asuransi pedesaan, petani dengan mudah jatuh pada jebakan utang yang memaksa mereka menjual aset produktif mereka, yang justru menciptakan kemiskinan lebih dalam. Karena itu dibutuhkan penguasaan lahan pertanian minimum oleh petani untuk hidup sejahtera dan mengembangkan usahanya, yang ditetapkan minimum seluas 2 hektar oleh UU No. 56/1960.

**Bila pada 2003 jumlah RT usaha pertanian masih 31,2 juta RT, maka pada 2013 angka ini turun hingga 5,1 juta RT, dimana 5,0 juta RT diantaranya adalah RT usaha pertanian dengan luas lahan dibawah 0,1 hektar.**

Dalam satu dekade terakhir, 2003-2013, terjadi penurunan jumlah RT Usaha pertanian secara masif. Bila pada 2003 jumlah RT usaha pertanian masih 31,2 juta RT, maka pada 2013 angka ini turun hingga 5,1 juta RT, dimana 5,0 juta RT diantaranya adalah RT usaha pertanian dengan luas lahan dibawah 0,1 hektar. Hilangnya petani skala kecil ini paling banyak terjadi di Jawa, yaitu Jawa Tengah (-1,36 juta RT), diikuti Jawa Barat (-1,29 juta RT), Jawa Timur (-1,21 juta RT) dan Banten (-269 ribu RT).



**Sejak lebih dari enam dekade yang lalu, rata-rata luas lahan yang dikuasai petani tidak pernah lebih dari 1 hektar.**

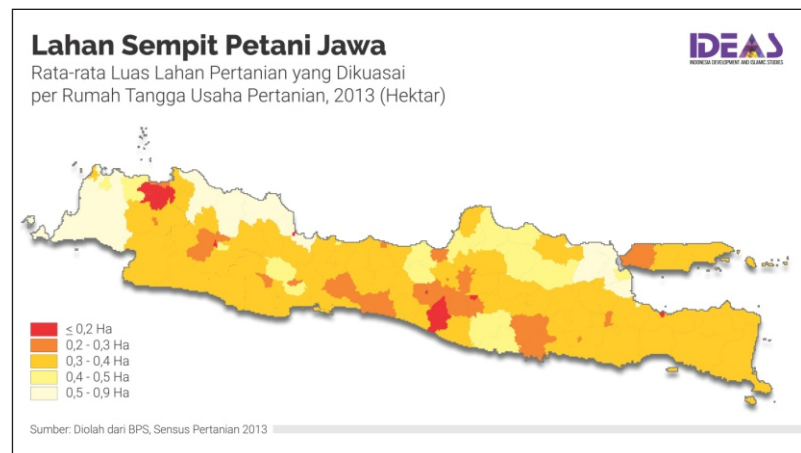
**Lebih dari setengah petani Indonesia hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektar**

**tekanan terhadap kesenjangan lahan meningkat oleh investor yang melakukan akuisisi lahan skala besar untuk berbagai proyek residensial dan industri.**

## Hilangnya Petani Kami

Salah satu akar masalah utama sulitnya menurunkan kemiskinan, di pedesaan khususnya, adalah distribusi tanah yang sangat terkonsentrasi di segelintir elit. Dengan sebagian besar masyarakat pedesaan masih menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian, penguasaan lahan menjadi krusial dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. Kesenjangan lahan pertanian di Indonesia adalah persisten dan lebar. Sejak lebih dari enam dekade yang lalu, rata-rata luas lahan yang dikuasai petani tidak pernah lebih dari 1 hektar.

Lebih dari setengah petani Indonesia hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektar, yaitu petani gurem, terutama di Jawa dimana petani dengan lahan kurang dari 0,1 hektar tersebar luas. Petani Jawa dengan rata-rata luas lahan paling kecil, kurang dari 0,2 hektar, terdapat di daerah perkotaan seperti mulai dari kota kecil seperti Yogyakarta dan Surakarta hingga kota metropolitan seperti Bekasi, Depok dan Tangerang Selatan. Sedangkan petani Jawa dengan rata-rata luas lahan paling besar, antara 0,5 – 0,9 hektar, terutama ditemui di sentra-sentra padi Jawa Barat yaitu Kab. Karawang, Kab. Indramayu, dan Kab. Bekasi.



Kesenjangan penguasaan lahan pertanian adalah krusial karena selain mengancam keberlanjutan produksi pangan domestik, juga berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di sektor pertanian dan perekonomian secara keseluruhan. Seiring urbanisasi dan ekspansi kota-kota terutama di Jawa, tekanan terhadap kesenjangan lahan meningkat oleh investor yang melakukan akuisisi lahan skala besar untuk berbagai proyek residensial dan industri.

Dari 5,1 juta RT usaha pertanian yang hilang dalam rentang

2003-2013, sekitar 90% nya terjadi di Jawa. Hilangnya RT usaha pertanian skala kecil terjadi merata di seluruh Jawa. Penurunan jumlah RT usaha pertanian terbesar terjadi di daerah penyangga Jakarta (Jabodetabek), yaitu Kab. Tangerang (-140 ribu RT) dan Kab. Bekasi (-119 ribu RT), serta koridor timur Jakarta seperti Kab. Karawang (-138 ribu RT), Kab. Indramayu (-104 ribu RT) dan Kab. Cirebon (-103 ribu RT). Penurunan jumlah RT usaha pertanian yang signifikan juga tercatat di kantong-kantong pertanian di Jawa Timur seperti Kab. Jember dan di Jawa Tengah seperti Kab. Klaten dan Kab. Jepara.

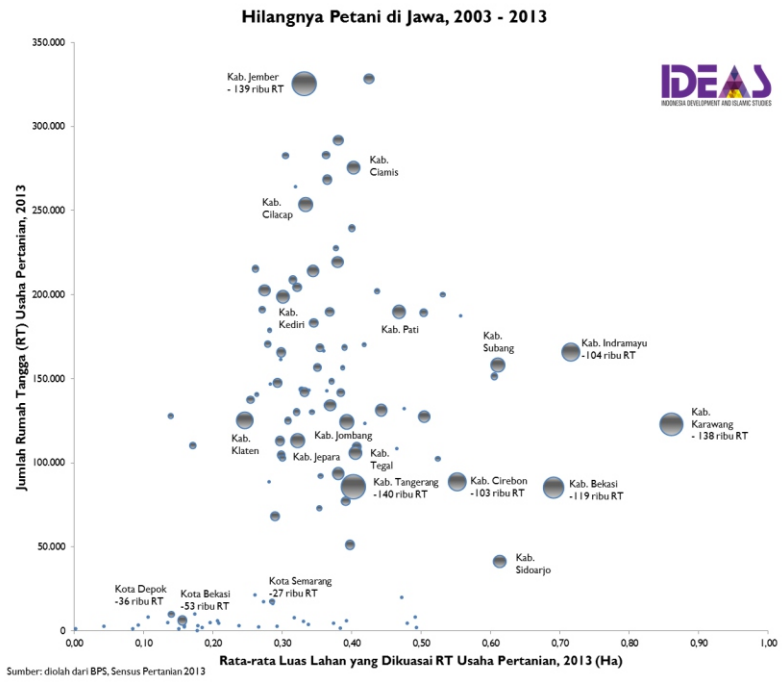
**Perilaku pengembang proyek properti dan residensial yang mencari keuntungan dari kenaikan harga tanah, membuat konversi lahan pertanian terjadi secara masif**

Urbanisasi dan pemekaran kota ke daerah sekitarnya (*urban sprawl*), membuat harga tanah di wilayah pedesaan mengalami kenaikan. Perilaku pengembang proyek properti dan residensial yang mencari keuntungan dari kenaikan harga tanah, membuat konversi lahan pertanian terjadi secara masif, terutama di wilayah sekitar Jakarta (Jabodetabek), Bandung, Semarang (Kedungsepur), Solo, Yogyakarta (Kartamantul), dan Surabaya (Gerbangkertasusila).

Terjangan urbanisasi ini bertemu dengan rendahnya kesejahteraan petani gurem, mengancam sentra pertanian pangan di seantero Jawa. Ekspansi lahan pertanian baru di luar Jawa yang menjadi respon kebijakan utama pemerintah adalah sah, namun beresiko tinggi jika ditujukan sebagai pengganti tanah pertanian Jawa karena kesuburan tanah dan kultur pertanian yang jauh berbeda. Rangkaian pegunungan vulkanis yang melintasi pulau, membuat Jawa secara alamiah menjadi sentra pangan nusantara sejak dahulu kala karena struktur tanahnya yang sangat subur.

**Produksi pertanian skala kecil bukanlah peluang pekerjaan inferior jika didukung dengan ketersediaan lahan minimum, teknologi tepat guna, sistem pengairan yang terintegrasi, serta manajemen pupuk dan hama yang ramah lingkungan.**

Arah kebijakan utama seharusnya adalah mempertahankan dan mengembangkan pertanian skala kecil di Jawa. Produksi pertanian skala kecil bukanlah peluang pekerjaan inferior jika didukung dengan ketersediaan lahan minimum, teknologi tepat guna, sistem pengairan yang terintegrasi, serta manajemen pupuk dan hama yang ramah lingkungan. Arah kebijakan ini tidak hanya akan menjamin ketahanan pangan nasional namun juga akan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan secara mengesankan.





---

# Penguasaan Lahan dan Kedaulatan Rakyat

---

Indonesia berdiri di atas doktrin kedaulatan rakyat, yang menekankan pada hak rakyat untuk mengakses, menggunakan dan mengontrol tanah untuk menopang kehidupan mereka. Dengan demikian, kebijakan pertanahan nasional harus berpihak dan melindungi hak rakyat atas tanah. UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengartikulasikan hal ini dengan konsep “fungsi sosial” dari tanah.

**Kesenjangan ekonomi akan terus terjadi dan bahkan semakin meningkat ketika hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit**

Secara sosial-ekonomi, tanah adalah faktor produksi penting untuk ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, dan karenanya mencapai pemerataan lahan adalah krusial untuk alasan efisiensi dan keadilan. Kesenjangan ekonomi akan terus terjadi dan bahkan semakin meningkat ketika hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit, seperti tenaga kerja terdidik serta pemilik modal dan tanah.

## Tanah Air untuk Siapa?

---

**Politik ekonomi Indonesia yang banyak bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dan pengejaran rente dari tanah**

Di Indonesia, kesenjangan lahan yang banyak merupakan warisan kolonial, semakin memburuk di era kemerdekaan oleh kapitalisme kroni. Politik ekonomi Indonesia yang banyak bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dan pengejaran rente dari tanah, membuat akuisisi lahan skala luas oleh korporasi dan alih fungsi lahan pertanian secara masif untuk kepentingan residensial dan industri berjalan cepat.

Di penjuruk negeri ini, perubahan radikal terjadi dalam penggunaan tanah seiring pemberian konsesi pengelolaan jutaan hektar tanah ke segelintir pemilik modal besar. Secara khusus, konversi lahan dari lahan hutan dan pertanian menjadi aktivitas perkebunan dan pertambangan adalah masif. Distribusi lahan pun semakin tidak merata, koefisien gini lahan melejit dari 0,527 pada 1963 menjadi 0,680 pada 2013.

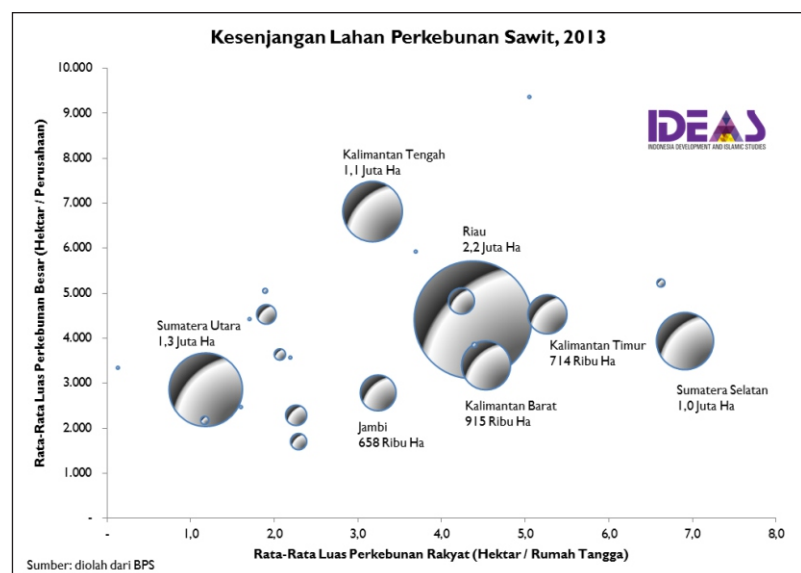
**Luas perkebunan kelapa sawit yang 20 tahun lalu baru di kisaran 3 juta hektar, kini pada 2017 telah menembus 12 juta hektar, dimana 55% diantaranya dikuasai oleh perusahaan besar swasta.**

Luas perkebunan kelapa sawit yang 20 tahun lalu baru di kisaran 3 juta hektar, kini pada 2017 telah menembus 12 juta hektar, dimana 55% diantaranya dikuasai oleh perusahaan besar swasta. Pada 2016, sebanyak 268 perusahaan tercatat mendapat hak pengelolaan hutan seluas 19,3 juta hektar. Di tahun yang sama tercatat, 254 perusahaan tambang swasta mendapat hak pengelolaan tambang migas dan mineral seluas 35,5 juta hektar. Akuisisi lahan skala besar oleh korporasi besar

**Pada 2016, gabungan 1.522 perusahaan swasta menguasai 6,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, hampir seratus kali lipat dari luas DKI Jakarta, lebih luas dari Sulawesi Tengah.**

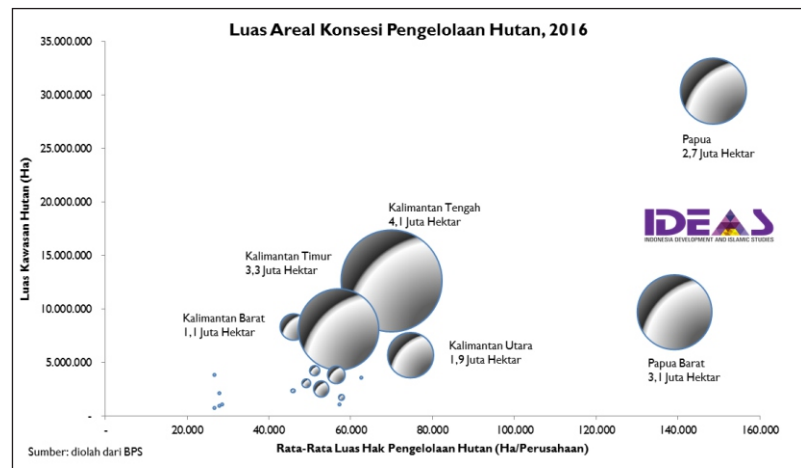
ini secara jelas mengindikasikan kesenjangan yang lebar dalam penguasaan lahan.

Di perkebunan kelapa sawit misalnya, kesenjangan penguasaan lahan adalah lebar. Di tujuh provinsi utama perkebunan kelapa sawit, rata-rata luas perkebunan besar swasta mencapai 4.102 hektar per perusahaan pada 2013, seribu kali lipat dari rata-rata luas perkebunan rakyat yang hanya sekitar 4 hektar per rumah tangga. Penguasaan lahan sawit oleh perusahaan swasta terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dimana setiap perusahaan rata-rata menguasai 6.821 hektar. Pada 2016, gabungan 1.522 perusahaan swasta menguasai 6,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, hampir seratus kali lipat dari luas DKI Jakarta, lebih luas dari Sulawesi Tengah.



**Secara keseluruhan, 268 perusahaan menguasai 19,3 juta hektar hutan, sekitar 15% dari luas daratan dan perairan kawasan hutan, setara luas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.**

Penguasaan lahan yang jauh lebih tinggi terjadi di sektor kehutanan, yang sebagian merupakan warisan era orde baru. Pada 2016, rata-rata luas konsesi hak pengelolaan hutan mencapai 72 ribu hektar per perusahaan. Rata-rata konsesi pengelolaan hutan terluas ditemui di Papua dan Papua Barat dimana setiap perusahaan menguasai sekitar 140 ribu hektar. Secara keseluruhan, 268 perusahaan menguasai 19,3 juta hektar hutan, sekitar 15% dari luas daratan dan perairan kawasan hutan, setara luas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Areal konsesi hutan terluas ditemui di Kalimantan tengah sekitar 4,1 juta hektar, diikuti Kalimantan Timur (3,3 juta hektar), Papua Barat (3,1 juta hektar) dan Papua (2,7 juta hektar).



**Pada 2016, 160 perusahaan swasta mendapat hak konsesi ladang minyak dan gas bumi seluas 32,2 juta hektar, baik *offshore* maupun *onshore*.**

Penguasaan lahan paling masif terjadi di sektor pertambangan. Pada 2016, 160 perusahaan swasta mendapat hak konsesi ladang minyak dan gas bumi seluas 32,2 juta hektar, baik *offshore* maupun *onshore*. Di tahun yang sama, tercatat 94 perusahaan swasta menguasai 3,4 juta hektar lahan pertambangan mineral. Sedangkan 5 perusahaan negara, tercatat menguasai 17,5 juta hektar lahan pertambangan, baik migas maupun mineral. Secara keseluruhan, 259 perusahaan besar menguasai hingga 53,1 juta hektar lahan pertambangan, baik migas maupun mineral.

### **Hegemoni Modal dan Kedaulatan Rakyat**

**Pasca krisis harga pangan internasional 2007-2008, akuisisi lahan skala besar oleh investor global meningkat pesat, termasuk di Indonesia.**

Pasca krisis harga pangan internasional 2007-2008, akuisisi lahan skala besar oleh investor global meningkat pesat, termasuk di Indonesia. Jutaan hektar lahan hutan dan pertanian dikonversi menjadi ladang perkebunan dan pertambangan. Meningkatnya komersialisasi tanah ini kerap menghasilkan konflik dan menciptakan tekanan yang semakin berat pada kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan dirinya pada tanah untuk ketahanan pangannya, kohesi sosialnya dan sumber penghidupannya. Ke depan, kebijakan pertanahan memegang peran krusial dalam menyediakan aset kolektif, menjaga rasa keadilan publik, meredistribusi kekayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup.

**Indonesia cenderung terus memfasilitasi akses investor global ke tanah dan buruh murah untuk perkebunan besar, bahkan diatas kerugian rakyat yang kehilangan hak atas tanahnya.**

Menghadapi derasnya arus investasi agribisnis global skala besar, Indonesia cenderung terus memfasilitasi akses investor global ke tanah dan buruh murah untuk perkebunan besar, bahkan diatas kerugian rakyat yang kehilangan hak atas tanahnya. Meski perkebunan sawit rakyat terus tumbuh seperti di Riau misalnya, namun berbeda dengan Thailand misalnya, Indonesia tidak membangun dukungan sistemik untuk rumah tangga usaha perkebunan yang mengolah kebun sawit-nya. Struktur pertanian dibanyak daerah berubah ke arah sektor

**... terlalu sering investasi swasta skala besar diiringi dengan pemindahan sejumlah besar orang secara paksa, gagal menciptakan lapangan kerja secara luas dan tidak membangun infrastruktur yang dijanjikan untuk masyarakat lokal.**

**Pembangunan infrastruktur yang kini sedang masif dilakukan di penjuru negeri, berpotensi semakin memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam oleh pemodal besar ini yang diiringi dengan akuisisi lahan skala besar.**

perkebunan, dengan konsentrasi tanah yang semakin tinggi seiring spekulasi pembelian lahan.

Atas nama investasi dan penciptaan lapangan kerja, arus modal masuk yang mengeksploitasi sumber daya alam dan tanah di sektor perkebunan dan pertambangan ini didukung oleh intervensi pemerintah. Namun terlalu sering investasi swasta skala besar diiringi dengan pemindahan sejumlah besar orang secara paksa, gagal menciptakan lapangan kerja secara luas dan tidak membangun infrastruktur yang dijanjikan untuk masyarakat lokal.

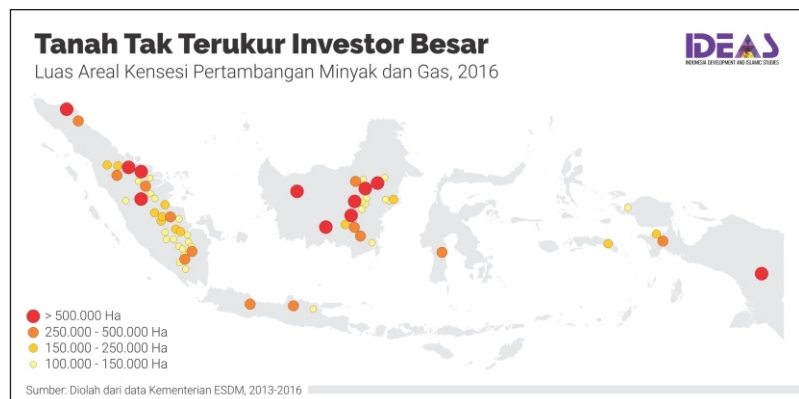
Pertambangan emas dan tembaga Freeport misalnya, yang mendapat areal kerja sangat luas dan jaminan keamanan dari militer, menjanjikan menjaga lingkungan hidup dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal seiring hilangnya tanah dan sumber daya alam mereka. Namun setelah 50 tahun kemudian, nyaris tidak ada perubahan kesejahteraan dari suku Amungme dan Kamoro yang hidup di sekitar wilayah tambang, tetap terkebelakang dan serba kekurangan.

Ketergantungan pertumbuhan ekonomi nasional pada kontribusi sektor penghasil komoditas, membuat investasi di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan ini terus mendapat dukungan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang kini sedang masif dilakukan di penjuru negeri, berpotensi semakin memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam oleh pemodal besar ini yang diiringi dengan akuisisi lahan skala besar.

IDEAS mengidentifikasi kini setidaknya terdapat 168 investor besar, baik swasta maupun negara, yang melakukan akuisisi lahan skala besar diatas 100 ribu hektar di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Di sektor pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, gabungan 103 perusahaan besar mendapat konsesi areal kerja seluas 20,3 juta hektar. Dengan kata lain, setiap perusahaan menguasai sekitar 200 ribu hektar lahan, tiga kali lipat dari luas DKI Jakarta.

Penguasaan lahan lebih masif terjadi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Gabungan 65 perusahaan migas mendapat konsesi ladang migas *onshore* seluas 16,6 juta hektar, atau sekitar 256 ribu hektar per perusahaan. Jika kita juga memperhitungkan perusahaan yang mendapat konsesi ladang migas *offshore*, maka penguasaan lahan di sektor

migas ini menjadi sangat fantastis. Tercatat 118 perusahaan migas mendapat konsesi areal kerja migas seluas 35,2 juta hektar, atau sekitar 300 ribu hektar per perusahaan, setara luas Provinsi DI Yogyakarta.



**peningkatan luas lahan pertanian yang dikuasai RT usaha pertanian ini bukan disebabkan oleh kenaikan kepemilikan tanah namun karena berpindahnya petani gurem terutama dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,1 hektar ke aktivitas non pertanian.**

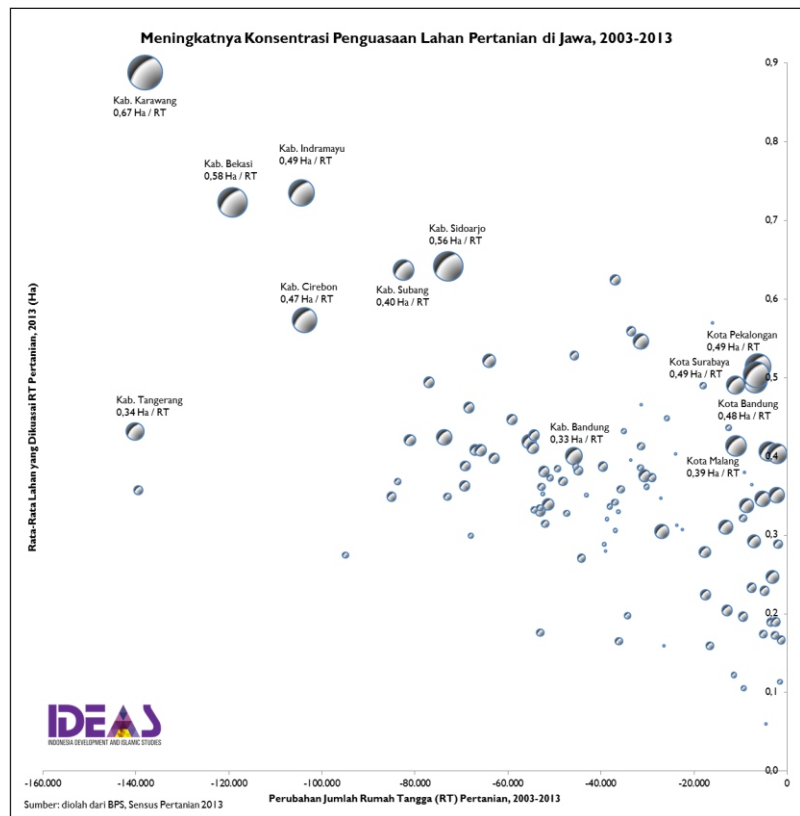
Konsentrasi lahan yang semakin meningkat bahkan juga terjadi di sektor pertanian, meski terjadi dalam skala lebih kecil namun melibatkan rakyat dalam jumlah sangat besar. Di Jawa, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai setiap rumah tangga (RT) usaha pertanian meningkat dua kali lipat dari 0,18 hektar pada 2003 menjadi 0,36 hektar pada 2013. Namun peningkatan luas lahan pertanian yang dikuasai RT usaha pertanian ini bukan disebabkan oleh kenaikan kepemilikan tanah namun karena berpindahnya petani gurem terutama dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,1 hektar ke aktivitas non pertanian.

Dengan kata lain, seiring perpindahan petani gurem ke sektor non pertanian, mereka melepas tanahnya ke pemilik lahan lain atau dikonversi untuk aktivitas non pertanian. Peningkatan rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai RT usaha pertanian di Jawa ini secara kuat berasosiasi dengan turunnya jumlah petani gurem. Daerah yang mengalami kenaikan luas lahan paling tinggi terjadi di sentra-sentra beras yang di saat

bersamaan juga mengalami penurunan jumlah RT usaha pertanian secara signifikan. Sebagai misal, Kab. Karawang mengalami kenaikan rata-rata luas lahan petani secara signifikan hingga 0,67 hektar per RT usaha pertanian, namun di saat yang sama mengalami penurunan jumlah petani gurem sebesar 138 ribu RT usaha pertanian.

**Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang per orang.**

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang per orang. Dengan posisi tanah sebagai faktor produksi yang penting bagi kebanyakan rakyat, maka kebijakan pertanahan baik di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan maupun pertambangan, menjadi krusial untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.



---

# Tentang IDEAS

---



**YUSUF WIBISONO**  
Direktur IDEAS



**FAJRI AZHARI**  
Peneliti IDEAS



**ANITA**  
Peneliti IDEAS



**RAHMI RAHMAWATI**  
Peneliti IDEAS



**VANNY ACHYANI**  
Peneliti IDEAS



**AGUNG NUGROHO**  
Peneliti IDEAS

## Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)

adalah lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Dompot Dhuafa.

Kegiatan inti lembaga adalah penelitian dan advokasi kebijakan dengan isu prioritas adalah penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial, ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan kesehatan dan pendidikan, makroekonomi dan keuangan negara, pembangunan pertanian dan perdesaan, perencanaan kota, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta peran Islam dalam pembangunan nasional.

IDEAS berkonsentrasi pada lima wilayah kajian yaitu kajian kebijakan publik (*policy brief*), analisis keuangan negara (APBN dan APBD), kontra *draft* Undang-Undang, cetak biru kebijakan sektoral (industri), dan strategi pembangunan nasional.

Produk utama IDEAS dipublikasikan dalam 6 seri kajian utama yaitu (i) *Indonesia Poverty and Inequality Report*, (ii) *Agriculture and Rural Development Report*, (iii) *Urban and Sustainable Development Report*, (iv) *Indonesia Pro Poor Budget Review*, (v) *Indonesia Economic and Social Development Review*, dan (vi) *Islam, Society and Social Change Review*.



Indonesia Development and Islamic Studies



@ideas\_riset



@ideas.riset



[www.ideas.or.id](http://www.ideas.or.id)

---



Perkantoran Ciputat Indah Permai, Blok A-12 Lt. 4  
Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat, Tangsel - 15419  
Phone: +62 21 7418 607  
Website: [www.ideas.or.id](http://www.ideas.or.id)